

DINAMIKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROGRAM DAK PABRIK GULA AREN PUTRI DESA NUNURANTAI

Tri Wijayanti Widianigseh ^{1,*}, Sasterio ², Sisrilnardi ³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, triwijayanti599@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, sasteriountad20@gmail.com

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, sisrilnardi13@gmail.com

*Correspondence : triwijayanti599@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Dinamika Pengambilan Keputusan, Pabrik Gula Aren Putri, Program DAK.*

Received : Juli 2026

Revised : Juli 2026

Accepted : Agustus 2026

ABSTRAK:

Pembangunan Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas aren dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya pemanfaatan data faktual, serta dominasi kewenangan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri berdasarkan teori pengambilan keputusan (Terry, 1977) yang meliputi intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman. Penelitian menggunakan desain deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Nunurantai, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong selama proses penelitian berlangsung, dengan melibatkan 4 informan utama, yaitu Kepala Desa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Hakelma, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan lebih didominasi oleh intuisi dan wewenang administratif dibandingkan pertimbangan rasional yang berbasis fakta dan partisipasi masyarakat, sehingga perencanaan, distribusi wewenang, serta pengelolaan pabrik belum berjalan secara optimal. Temuan lain menunjukkan bahwa pengalaman para pengambil keputusan telah dimanfaatkan, namun belum diintegrasikan secara maksimal dengan data empiris dan aspirasi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan pentingnya penerapan proses pengambilan keputusan yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis data faktual untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

ABSTRACT:

The development of the Putri Palm Sugar Factory in Nunurantai Village, Taopa District, Parigi Moutong Regency represents a local government initiative to increase the added value of palm sugar commodities and improve community

welfare. However, its implementation has encountered several challenges related to the decision-making process, including limited community participation, inadequate use of factual data, and the dominance of administrative authority. This study aims to analyze the dynamics of decision-making in the development of the Putri Palm Sugar Factory using George R. Terry's (1997) decision-making theory, which consists of intuition, rationality, facts, authority, and experience. This study employed a descriptive qualitative research design conducted in Nunurantai Village, Taopa District, Parigi Moutong Regency during the research period, involving four key informants: the Village Head, the Head of the Department of Industry and Trade, the Head of the Hakelma Division, and community representatives. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that the decision-making process was predominantly influenced by intuition and administrative authority rather than rational considerations based on factual evidence and community participation, resulting in suboptimal planning, authority distribution, and factory management. Other findings reveal that the experience of decision-makers was utilized but had not been optimally integrated with empirical data and community aspirations. This study contributes by emphasizing the importance of implementing a comprehensive, participatory, and evidence-based decision-making process to improve development effectiveness. The findings also imply that local governments should formulate development policies that are more transparent, accountable, and sustainable.

e-mail: jsipjurnal@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Selain berperan sebagai penyedia pangan, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Salah satu upaya meningkatkan nilai tambah sektor pertanian adalah melalui pengembangan agroindustri, yaitu kegiatan pengolahan hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Salah satu komoditas agroindustri yang berpotensi dikembangkan adalah gula aren. Gula aren merupakan produk olahan nira pohon aren yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Penelitian (Mahendra, Nuraeni and Amri, 2024) menunjukkan bahwa tanaman aren (*Arenga pinnata*) memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan perekonomian wilayah apabila dikelola secara optimal. Namun, proses pengolahan gula aren masih didominasi oleh cara tradisional sehingga memerlukan dukungan teknologi dan manajemen usaha yang lebih baik.

Pengembangan agroindustri gula aren tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian (Pongoh, 2016) menunjukkan bahwa efisiensi usaha pengolahan gula aren dipengaruhi oleh pengelolaan usaha, pemanfaatan sumber daya, serta dukungan para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian (Selvia and Danasari, 2024) menyatakan

bahwa keberhasilan pengembangan agroindustri gula aren dipengaruhi oleh dukungan teknologi, diversifikasi produk, kerja sama antar-*stakeholder*, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan industri gula aren tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku, tetapi juga oleh proses pengambilan keputusan yang tepat.

Kabupaten Parigi Moutong, khususnya Kecamatan Taopa, memiliki potensi pohon aren yang cukup besar sehingga berpeluang mengembangkan industri pengolahan gula aren. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai yang diharapkan mampu mengolah nira aren dan nira kelapa, menyerap hasil produksi petani, serta meningkatkan nilai tambah komoditas lokal.

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, Pabrik Gula Aren Putri hingga saat ini belum beroperasi meskipun pembangunan fisiknya telah selesai. Permasalahan utama yang ditemukan adalah proses pembangunan dilakukan tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik pohon aren dan pohon kelapa sebagai penyedia bahan baku. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat enggan mengontrak pohonnya karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Selain itu, harga pembelian nira yang ditawarkan pengelola belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga mereka lebih memilih menjual hasil sadapan kepada pihak lain atau mengolahnya sendiri. Akibatnya, pasokan bahan baku tidak terpenuhi dan operasional pabrik belum dapat dilaksanakan. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang kurang partisipatif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh kualitas proses pengambilan keputusan. (Heremba, 2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Distrik Ngguti belum optimal karena rendahnya kemampuan masyarakat mengidentifikasi kebutuhan prioritas serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap usulan masyarakat. Penelitian (Nisah, 2023) menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengembangan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tebo berjalan cukup baik melalui pelatihan dan pembinaan pelaku usaha. Sementara itu, (RATNA, 2025) menemukan bahwa implementasi perencanaan kelitbangan masih menghadapi hambatan berupa lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan anggaran.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengembangan agroindustri gula aren dari aspek produksi, efisiensi usaha, strategi pengembangan, dan kebijakan, belum banyak penelitian yang mengkaji proses pengambilan keputusan dalam pembangunan pabrik gula aren menggunakan teori (Terry, 1977) yang meliputi dasar intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman. Kondisi tersebut menjadi *research gap* yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan operasional Pabrik Gula Aren Putri sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah desa, pengelola pabrik, dan masyarakat sebagai penyedia bahan baku. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, efektif, dan berkelanjutan sehingga potensi komoditas aren di Kecamatan Taopa dapat dimanfaatkan secara optimal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, serta pengalaman para informan mengenai dasar-dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam pembangunan pabrik berdasarkan teori (Terry, 1977), yaitu intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu J.S. selaku Kepala Desa Nunurantai, S. selaku Sekretaris Desa Nunurantai, Y. selaku mantan Sekretaris Desa Nunurantai, F.D. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong, serta I. selaku Kepala Bidang Industri Hasil Hutan, Kerajinan Logam, Mesin, dan Aneka Alat Angkut pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan dalam proses pembangunan Pabrik Gula Aren Putri. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses pengambilan keputusan, pertimbangan yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan dalam pembangunan Pabrik Gula Aren Putri.

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pabrik, proses pengelolaan, serta situasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami kondisi lapangan secara lebih komprehensif sebagai pelengkap data hasil wawancara.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data sekunder meliputi dokumen perusahaan, profil Pabrik Gula Aren Putri, dokumen Pemerintah Desa Nunurantai, laporan, arsip, foto kegiatan, serta literatur yang berkaitan dengan agroindustri gula aren dan teori pengambilan keputusan. Data tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang diperoleh di lapangan.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis mengacu pada model (Miles, Huberman and Saldana, 2014), yang meliputi reduksi data, yaitu memilih, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan data berdasarkan temuan di lapangan untuk menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Pabrik Gula Aren Putri ditinjau dari aspek intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman.

Hasil

1. Intuisi

Pengambilan keputusan dalam menerima pembangunan Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai pada tahap awal didasarkan pada intuisi Kepala Desa terhadap potensi sumber daya lokal. Pertimbangan utama yang digunakan adalah melimpahnya bahan baku nira kelapa serta banyaknya masyarakat yang telah lama memproduksi gula merah secara tradisional.

Kepala Desa menjelaskan bahwa keputusan menerima pembangunan pabrik didasarkan pada kondisi desa saat itu, yaitu ketersediaan bahan baku dan banyaknya pengrajin gula aren, meskipun pengelolaannya masih dilakukan secara perorangan. *"...pabrik masuk karena bahan baku banyak dan pengelola gula juga banyak, meskipun saat itu masih dikelola masing-masing."* (Wawancara Joko Suwarso, 2 Juli 2025).

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak melibatkan seluruh perangkat desa. Sekretaris Desa yang menjabat pada saat itu menyatakan bahwa pembahasan awal mengenai pendirian pabrik hanya dilakukan antara Kepala Desa dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong. Ia mengetahui adanya hibah tanah desa setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*. *"...pembahasan awal hanya antara kepala desa dan dinas, saya mengetahui setelah penandatanganan MoU hibah tanah."* (Wawancara Yuyun, 4 Juli 2025).

Selain itu, Sekretaris Desa Nunurantai menjelaskan bahwa pemerintah desa tidak pernah terlibat secara langsung dalam pengelolaan Pabrik Gula Aren Putri. Menurutnya, pembangunan pabrik lebih didasarkan pada potensi bahan baku yang dimiliki Desa Nunurantai sebagai lokasi yang dianggap paling sesuai. *"...pemerintah desa tidak pernah mengelola pabrik, pemilihan lokasi karena bahan bakunya memang banyak."* (Wawancara Siswandi, 2 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keputusan menerima pembangunan Pabrik Gula Aren Putri berangkat dari keyakinan terhadap potensi sumber daya alam yang dimiliki desa. Proses pengambilan keputusan lebih menitikberatkan pada pertimbangan intuisi pemimpin, sedangkan keterlibatan perangkat desa dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan masih terbatas.

2. Rasional

Pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri didasarkan pada pertimbangan rasional untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil produksi gula aren masyarakat. Pembangunan pabrik dipandang sebagai sarana yang dapat menghimpun produksi para pengrajin gula aren dalam satu tempat sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Desa Nunurantai menjelaskan bahwa pembangunan pabrik bukan merupakan program yang diusulkan oleh satu desa, melainkan program pengembangan yang diperuntukkan bagi wilayah Kecamatan Taopa. *"...pembangunan pabrik ini untuk satu kecamatan, bukan hanya satu desa."* (Wawancara Siswandi, 2 Juli 2025). Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan bahwa pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (SIKIM) gula merah berawal dari permohonan kelompok pengrajin gula merah. Pembangunan tersebut bertujuan mengakomodasi para pengrajin dalam satu kelompok usaha terpadu. *"...SIKIM dibangun berdasarkan permohonan kelompok pengrajin agar menjadi satu kelompok usaha terpadu."* (Wawancara Fit Dewana, 18 Juli 2025).

Sementara itu, Kepala Bidang Industri Hasil Hutan, Kerajinan, Logam, Mesin, dan Aneka Alat Angkut menjelaskan bahwa proses pembangunan telah melalui tahapan kajian dan verifikasi teknis sebagai persyaratan pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dilakukan peninjauan lapangan oleh tim kementerian sebelum pembangunan disetujui. *"...pembangunan diawali dengan kajian, pengusulan DAK, dan verifikasi lokasi oleh tim kementerian."* (Wawancara Ija, 18 Juli 2025).

Selain itu, Kepala Desa Nunurantai menyatakan bahwa sebelum menerima pembangunan pabrik telah dilakukan pertimbangan mengenai manfaat dan dampaknya, dengan tujuan utama meningkatkan hasil produksi masyarakat. *"...kami mempertimbangkan manfaatnya untuk meningkatkan hasil produksi masyarakat."* (Wawancara Joko Suwarso, 2 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri didasarkan pada pertimbangan rasional melalui analisis manfaat ekonomi, potensi produksi gula aren, serta mekanisme perencanaan yang melibatkan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah desa juga mempertimbangkan manfaat pembangunan pabrik sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil produksi.

3. Fakta

Pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri didasarkan pada data dan informasi yang tersedia pada saat perencanaan. Data tersebut berupa penetapan Kecamatan Taopa sebagai sentra gula merah melalui Surat Keputusan (SK) Bupati serta hasil survei yang menunjukkan potensi produksi gula aren dan banyaknya pengrajin gula merah di Desa Nunurantai.

Kepala Bidang Industri Hasil Hutan, Kerajinan, Logam, Mesin, dan Aneka Alat Angkut menjelaskan bahwa pembangunan pabrik didasarkan pada status Kecamatan Taopa sebagai sentra gula merah yang didukung oleh hasil survei mengenai potensi

masyarakat. *"...pembangunan pabrik sesuai kebutuhan masyarakat karena daerah tersebut merupakan sentra gula merah dan telah memiliki SK dari bupati."* (Wawancara Ija, 18 Juli 2025).

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Nunurantai menunjukkan bahwa setelah pembangunan selesai, kondisi di lapangan mengalami perubahan. Pabrik tidak beroperasi secara optimal karena hanya digunakan pada tahap uji coba, sementara sebagian besar pengelola tidak lagi melanjutkan pengelolaan pabrik. *"...pabrik hanya sampai tahap uji coba, kemudian pengelolanya sudah tidak ada lagi."* (Wawancara Joko Suwarso, 2 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri menggunakan data administratif dan hasil survei sebagai dasar penentuan pembangunan. Namun, setelah pembangunan selesai terjadi perubahan kondisi di lapangan yang ditandai dengan tidak berjalannya pengelolaan pabrik secara berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara data yang digunakan pada tahap perencanaan dengan kondisi faktual setelah pembangunan dilaksanakan.

4. Wewenang

Pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri melibatkan beberapa tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Kewenangan utama dalam pembangunan berada pada pemerintah pusat melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan pemerintah kabupaten bertugas menyusun proposal dan kajian teknis. Pemerintah desa berperan dalam menyiapkan lokasi serta memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan.

Kepala Bidang Industri Hasil Hutan, Kerajinan, Logam, Mesin, dan Aneka Alat Angkut menjelaskan bahwa pembangunan pabrik merupakan program pemerintah pusat sehingga pelaksanaannya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, sementara pemerintah desa hanya menyiapkan lokasi dan dokumen pendukung. *"...pembangunan merupakan program pemerintah pusat, sedangkan pemerintah desa menyiapkan lokasi dan persyaratan administrasi."* (Wawancara Ija, 18 Juli 2025).

Sementara itu, Kepala Desa Nunurantai menyampaikan bahwa selama proses pembangunan tidak dilaksanakan musyawarah desa secara menyeluruh. Informasi mengenai rencana pembangunan juga tidak disampaikan secara terbuka kepada perangkat desa maupun masyarakat. *"...tidak ada musyawarah desa dan penyampaian informasi secara terbuka pada saat pembangunan."* (Wawancara Joko Suwarso, 2 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan dalam pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri lebih banyak berada pada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, sedangkan pemerintah desa berperan sebagai pelaksana administrasi dan penyedia lokasi pembangunan. Selain itu, keterlibatan perangkat desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas.

5. Pengalaman

Pengalaman masyarakat dalam memproduksi gula merah secara tradisional menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri. Pengalaman tersebut dipandang sebagai potensi yang dapat mendukung pengembangan industri gula aren dalam skala yang lebih besar.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong menjelaskan bahwa pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) gula merah didasarkan pada keberadaan kelompok pengrajin yang telah lama memproduksi gula merah di Desa Nunurantai. *"...kelompok pengrajin gula merah sudah lama memproduksi sehingga dibangun fasilitas yang lebih modern untuk mendukung kegiatan mereka."* (Wawancara Fit Dewana, 18 Juli 2025).

Namun, hasil wawancara dengan Kepala Desa Nunurantai menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat lebih banyak terbatas pada sistem produksi tradisional. Setelah pabrik dibangun, muncul kendala dalam operasional karena sistem produksi di pabrik menggunakan bahan bakar gas yang memerlukan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan cara tradisional yang memanfaatkan kayu bakar. *"...produksi di pabrik menggunakan gas sehingga biayanya lebih tinggi dibandingkan produksi tradisional."* (Wawancara Joko Suwarso, 2 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengalaman masyarakat dalam mengelola usaha gula merah menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan Pabrik Gula Aren Putri. Namun, pengalaman tersebut lebih berfokus pada produksi secara tradisional sehingga belum sepenuhnya mendukung pengelolaan pabrik dengan sistem produksi yang lebih modern.

Pembahasan

1. Pengambilan Keputusan Berbasis Keyakinan terhadap Potensi Lokal

Keputusan menerima pembangunan Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai lebih banyak didasarkan pada keyakinan Kepala Desa terhadap potensi sumber daya lokal, terutama ketersediaan bahan baku nira aren dan pengalaman masyarakat dalam memproduksi gula aren secara tradisional. Dalam perspektif teori (Terry, 1977), kondisi tersebut pengambilan keputusan berdasarkan intuisi merupakan keputusan yang didasarkan pada pengalaman, penilaian pribadi, serta keyakinan pengambil keputusan tanpa melalui analisis yang mendalam dan sistematis. Pendekatan ini umumnya digunakan ketika keputusan harus diambil secara cepat atau ketika informasi yang tersedia terbatas (Collins, Collins and Carson, 2016).

Meskipun intuisi dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan suatu keputusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pembangunan belum sepenuhnya didukung oleh mekanisme partisipatif. Proses pengambilan keputusan lebih didominasi oleh Kepala Desa bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan perangkat desa tidak terlibat secara menyeluruh, termasuk dalam proses hibah tanah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keyakinan terhadap potensi lokal lebih diutamakan dibandingkan pembahasan bersama mengenai kesiapan kelembagaan, pengelolaan, maupun keberlanjutan operasional pabrik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Murdianto, Alamsyah and Sisrinardi, 2025) yang menyatakan bahwa pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Kayu Agung belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten di Desa Kayu Agung. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Kayu Agung mencerminkan kesadaran kolektif warga terhadap pembangunan desa.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Wahida, Hartawan and Mahfuzat, 2025) yang menjelaskan bahwa prinsip aturan hukum dan transparansi menjadi kendala dalam penyaluran beras miskin. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 5 Tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, belum berjalan dengan efektif di karena ketidak tepatan sasaran penerima dimana masih ada beberapa masyarakat yang menerima tidak sesuai dengan kriteria dan adanya sistem kekeluargaan yang terjadi dalam proses penyaluran tersebut. Selain itu, penelitian (Ramdani, Nurhannis and Abdi, 2024) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak berlangsung maksimal akibat rendahnya efektivitas pada keempat variabel tersebut, baik dari pihak pelaksana maupun kelompok yang dituju. Meskipun ada upaya dari pemerintah dalam menyampaikan informasi, banyak PKL merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup, terutama terkait perizinan dan pemahaman tentang kebijakan.

Namun demikian, penerapan intuisi dalam penelitian ini belum diimbangi dengan proses pengambilan keputusan yang partisipatif. Tidak dilibatkannya perangkat desa secara menyeluruh dalam proses perencanaan dan hibah tanah menunjukkan bahwa keputusan lebih bersifat personal daripada kolektif. Akibatnya, setelah pembangunan selesai, tidak terdapat kejelasan mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan pabrik sehingga operasionalnya tidak berjalan secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa intuisi memiliki peran penting pada tahap awal pengambilan keputusan karena mampu mendorong lahirnya suatu kebijakan berdasarkan pengalaman dan keyakinan terhadap potensi lokal. Akan tetapi, intuisi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan suatu program pembangunan. Agar keputusan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan, diperlukan dukungan perencanaan yang sistematis, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta kesiapan kelembagaan dalam mengelola program yang telah diputuskan.

2. Pertimbangan Logis dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan

Pembangunan Pabrik Gula Aren Putri didasarkan pada pertimbangan logis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas gula aren melalui pengembangan industri pengolahan. Hal tersebut terlihat dari adanya proses pengusulan pembangunan melalui jalur pemerintahan, penyusunan kajian sebagai syarat pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga verifikasi teknis oleh pemerintah pusat sebelum program disetujui.

Meskipun demikian, rasionalitas yang diterapkan dalam penelitian ini lebih

berorientasi pada aspek administratif dan kelayakan pembangunan fisik dibandingkan dengan kesiapan pengelolaan pascapembangunan. Perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kelembagaan, sistem pemasaran, keberlanjutan bahan baku, sumber daya manusia, serta pembagian peran antar-pemangku kepentingan. Akibatnya, keputusan yang secara administratif dinilai layak belum mampu menjamin keberhasilan implementasi program dalam jangka panjang. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Putra, Alamsyah and Kamindang, 2024) yang menyatakan bahwa partisipasi implementasi kebijakan peraturan daerah penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palu masih belum maksimal dikarenakan masih ditemukan kendala. Hal ini tercermin pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana parameter pada komunikasi dan disposisi yang belum optimal, menjadi hal yang tidak diperhatikan dalam penanganannya. pada aspek komunikasi dapat disimpulkan bahwa belum adanya inovasi sosialisasi berkelanjutan kepada sasaran kebijakan, dan faktor disposisi belum bisa berjalan baik karena upaya preventif berupa program pemberian pelatihan keterampilan bagi para gelandangan dan pengemis belum terlaksana kembali sejak wabah covid 19. Penelitian (Mashita, Mahfuzat and Abdi, 2024) juga menjelaskan bahwa dari kolaborasi antar pihak-pihak belum berjalan secara optimal. Tantangan untuk komunikasi yang terbatas, kurangnya kepercayaan, dan rendahnya komitmen. Namun Upaya perbaikan telah dimulai, Seperti dialog tatap muka, Pembangunan kepercayaan, dan peningkatan pemahaman Bersama.

Namun demikian, rasionalitas dalam penelitian ini masih terbatas pada tahap perencanaan pembangunan dan belum mencakup keseluruhan siklus implementasi program. Perencanaan belum didukung oleh strategi pengelolaan, pembiayaan, pemasaran, maupun penguatan kelembagaan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan secara optimal ketika pabrik mulai beroperasi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang rasional tidak cukup hanya didasarkan pada kelayakan administratif dan potensi sumber daya. Keputusan yang efektif juga memerlukan perencanaan implementasi yang berkelanjutan, pelibatan seluruh pemangku kepentingan, serta kesiapan kelembagaan agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

3. Pemanfaatan Data sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Pembangunan Pabrik Gula Aren Putri didasarkan pada data dan informasi yang tersedia pada tahap perencanaan, seperti penetapan Kecamatan Taopa sebagai sentra gula merah melalui Surat Keputusan Bupati, hasil survei potensi wilayah, serta keberadaan pengrajin gula aren di Desa Nunurantai. Dalam perspektif (Terry, 1977), penggunaan data tersebut mencerminkan adanya upaya menerapkan pengambilan keputusan berbasis fakta, yaitu keputusan yang disusun berdasarkan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi (Maxwell, Rotz and Garcia, 2016).

Namun, fakta yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan lebih berorientasi pada data administratif dan potensi wilayah pada saat program diusulkan. Setelah pembangunan selesai, perubahan kondisi di lapangan, seperti berkurangnya pengelola, belum optimalnya manajemen, serta tidak beroperasinya pabrik secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan belum didukung oleh pembaruan data dan evaluasi secara berkala. Akibatnya, keputusan yang pada awalnya sesuai dengan kondisi lapangan menjadi kurang relevan terhadap perkembangan situasi setelah implementasi program.

Penelitian (Wirawan, Pageno and Alamsyah, 2024) juga menjelaskan bahwa penerapan sistem pelayanan publik secara online telah memudahkan akses informasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal infrastruktur digital dan perluasan fitur interaktif. Selain itu, penelitian (Alamsyah, Ahsan and Sisrilnardi, 2024) menemukan bahwa perencanaan anggaran PDAM Uetanah menghadapi kendala seperti minimnya kolaborasi antara PDAM, pemerintah daerah, dan masyarakat; kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran; serta pengaruh tekanan eksternal terhadap kemandirian anggaran. Upaya perbaikan diperlukan, terutama dalam memperkuat komunikasi, pengawasan, dan prioritas pada kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Penerapan dasar fakta belum dilakukan secara menyeluruh karena tidak disertai mekanisme pembaruan data setelah pembangunan berlangsung. Perubahan kondisi, seperti berkurangnya pengelola, belum optimalnya sistem manajemen, dan tidak beroperasinya pabrik secara berkelanjutan, menunjukkan bahwa keputusan tidak lagi didukung oleh informasi faktual yang sesuai dengan perkembangan di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan kebijakan yang awalnya dianggap tepat menjadi kurang efektif pada tahap implementasi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan data dalam pengambilan keputusan tidak hanya penting pada tahap perencanaan, tetapi juga harus diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan pembaruan informasi secara berkelanjutan. Melalui proses tersebut, keputusan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi sehingga tujuan pembangunan lebih mudah dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

4. Distribusi Kewenangan dalam Proses Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pembangunan Pabrik Gula Aren Putri dilaksanakan melalui mekanisme kewenangan yang berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa. Dalam perspektif (Terry, 1977), Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang merupakan keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki kedudukan atau otoritas sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan dalam struktur organisasi (Katayama, Meagher and Wait, 2018). Kewenangan tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan organisasi Pembangunan pabrik melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa kewenangan utama berada pada

pemerintah pusat, sedangkan pemerintah kabupaten bertugas menyiapkan dokumen perencanaan dan pemerintah desa lebih berperan dalam memenuhi persyaratan administratif serta penyediaan lokasi.

Meskipun mekanisme kewenangan telah berjalan sesuai struktur birokrasi, pelibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan lebih bersifat *top-down*, sehingga ruang partisipasi pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menjadi relatif kecil. Akibatnya, dukungan terhadap pengelolaan pabrik setelah pembangunan belum terbentuk secara optimal karena pemerintah desa dan masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima program daripada sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pogrebinschi and Ryan, 2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dipengaruhi oleh kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan kewenangan yang disertai partisipasi masyarakat akan memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan rasa memiliki terhadap program, serta mendorong keberlanjutan pembangunan.

Penelitian ini, pembangunan Pabrik Gula Aren Putri telah memenuhi unsur tersebut karena keputusan dilaksanakan melalui mekanisme birokrasi yang melibatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan utama, pemerintah kabupaten sebagai pelaksana perencanaan, dan pemerintah desa sebagai pendukung pelaksanaan di tingkat lokal.

Namun, pelaksanaan kewenangan belum sepenuhnya diimbangi dengan pelibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterbatasan ruang partisipasi menyebabkan pemerintah desa tidak memiliki peran yang kuat dalam menentukan kebijakan maupun pengelolaan pabrik setelah pembangunan selesai. Akibatnya, rasa memiliki terhadap program menjadi rendah sehingga berdampak pada keberlanjutan operasional pabrik.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan formal merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan, tetapi efektivitasnya akan lebih optimal apabila disertai dengan koordinasi yang baik dan partisipasi aktif pemerintah desa serta masyarakat. Sinergi antara kewenangan birokrasi dan partisipasi lokal akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif, diterima oleh masyarakat, dan berkelanjutan.

5. Pengalaman sebagai Landasan Pengambilan Keputusan Pembangunan

Pembangunan Pabrik Gula Aren Putri didasarkan pada pengalaman masyarakat Desa Nunurantai yang telah lama mengelola usaha gula aren secara tradisional. Dalam perspektif (Terry, 1977), pengalaman merupakan salah satu dasar pengambilan keputusan karena memberikan pengetahuan praktis yang diperoleh melalui keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan. Pengetahuan yang berasal dari pengalaman memungkinkan seseorang mengenali pola permasalahan, menilai berbagai alternatif, serta mengambil keputusan yang lebih efektif berdasarkan

pembelajaran dari praktik sebelumnya (Luan, Reb and Gigerenzer, 2019). Pengalaman masyarakat sebagai pengrajin gula aren menjadi pertimbangan bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pembangunan fasilitas produksi yang lebih modern untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, pengalaman yang dimiliki masyarakat lebih banyak berkaitan dengan proses produksi tradisional dan belum didukung oleh kemampuan dalam mengelola industri yang menggunakan sistem produksi modern. Perbedaan teknologi, kebutuhan biaya operasional, serta pola pengelolaan menyebabkan pengalaman yang dimiliki belum dapat diterapkan secara optimal dalam operasional pabrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman sebagai dasar pengambilan keputusan perlu diikuti dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem produksi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Luther *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa pengalaman masyarakat merupakan modal penting dalam pengembangan usaha, tetapi harus didukung oleh pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas agar dapat meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap teknologi serta sistem pengelolaan yang lebih modern dan berkelanjutan. Penelitian ini, pengalaman masyarakat sebagai pengrajin gula aren menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembangunan Pabrik Gula Aren Putri karena dinilai mampu mendukung pengembangan industri gula aren di Desa Nunurantai.

Pengalaman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengelolaan industri semi-modern. Pengalaman masyarakat lebih berorientasi pada produksi tradisional, sedangkan operasional pabrik memerlukan kemampuan manajerial, penguasaan teknologi, serta pengelolaan biaya produksi yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan pengalaman yang dimiliki belum mampu mendukung keberlangsungan operasional pabrik secara optimal.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman merupakan dasar yang penting dalam pengambilan keputusan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan mengembangkan pengalaman tersebut menjadi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan program. Oleh karena itu, pengalaman masyarakat perlu didukung melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan sehingga tujuan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pengambilan keputusan dalam pembangunan Pabrik Gula Aren Putri di Desa Nunurantai belum sepenuhnya menerapkan dasar pengambilan keputusan menurut (Terry, 1977), yaitu intuisi, rasional, fakta, wewenang, dan pengalaman secara seimbang. Keputusan pembangunan lebih banyak didasarkan pada kewenangan pemerintah serta potensi sumber daya yang tersedia, namun belum melibatkan masyarakat secara optimal sebagai penyedia bahan baku. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak mendukung

operasional pabrik, terutama karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan harga pembelian nira yang ditawarkan belum sesuai dengan harapan mereka. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan baku tidak terpenuhi sehingga Pabrik Gula Aren Putri belum dapat beroperasi meskipun pembangunan fisiknya telah selesai.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan agroindustri tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh proses pengambilan keputusan yang partisipatif, berbasis fakta, rasional, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pengelola pabrik perlu memperkuat pelibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, meningkatkan koordinasi antarpihak, serta menyusun mekanisme kerja sama dan penetapan harga bahan baku yang lebih adil agar operasional Pabrik Gula Aren Putri dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi penelitian sehingga penelitian selanjutnya disarankan mengkaji dinamika pengambilan keputusan pada agroindustri di wilayah lain untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sasterio dan Bapak Sisrilnardi atas bimbingan, arahan, masukan, serta dukungan yang diberikan selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Nunurantai, pengelola Pabrik Gula Aren Putri, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data, informasi, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Referensi

- Alamsyah, R., Ahsan, S.C. and Sisrilnardi (2024) 'Perencanaan Anggaran dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Uetanah di Kabupaten Tojo Una-Una', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 91–106.
- Collins, D., Collins, L. and Carson, H.J. (2016) "'If It Feels Right, Do It': Intuitive Decision Making in a Sample of High-Level Sport Coaches', *Frontiers in Psychology*, 7. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00504>.
- Heremba, S.P. (2022) *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK NGGUTI KABUPATEN MERAUKE PAPUA*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- Katayama, H., Meagher, K.J. and Wait, A. (2018) 'Authority and communication in firms', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 155, pp. 315–348. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.09.005>.
- Luan, S., Reb, J. and Gigerenzer, G. (2019) 'Ecological Rationality: Fast-and-Frugal Heuristics for Managerial Decision Making under Uncertainty', *Academy of Management Journal*, 62(6), pp. 1735–1759. Available at: <https://doi.org/10.5465/amj.2018.0172>.

- Luther, G.C. *et al.* (2018) 'Impacts of farmer field schools on productivity of vegetable farming in Indonesia', *Natural Resources Forum*, 42(2), pp. 71–82. Available at: <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12144>.
- Mahendra, Y.I., Nuraeni, N. and Amri, A.A. (2024) 'ANALISIS PREFERENSI KONSUMEN TERHADAP PRODUK GULA AREN', *Wiratani: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 7(2), p. 203. Available at: <https://doi.org/10.33096/wiratani.v7i2.473>.
- Mashita, P., Mahfuzat and Abdi, Fahmi S. (2024) 'COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA PARALAYANG WAYU DI KECAMATAN MARAWOLA BARAT KABUPATEN SIGI', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 31–40.
- Maxwell, N.L., Rotz, D. and Garcia, C. (2016) 'Data and Decision Making: Same Organization, Different Perceptions; Different Organizations, Different Perceptions', *American Journal of Evaluation*, 37(4), pp. 463–485. Available at: <https://doi.org/10.1177/1098214015623634>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Los Angeles: SAGE.
- Murdianto, R.B., Alamsyah, M.N. and Sisrinardi (2025) 'DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAYU AGUNG KECAMATAN MEPANG KABUPATEN PARIGI MOUTONG', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(4), pp. 204–216.
- Nisah, F.N.Z. (2023) *ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 (Studi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja)*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Pogrebinschi, T. and Ryan, M. (2018) 'Moving beyond input legitimacy: When do democratic innovations affect policy making?', *European Journal of Political Research*, 57(1), pp. 135–152. Available at: <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12219>.
- Pongoh, M.A. (2016) 'Analisis Penerapan Manajemen Rantai Pasokan Pabrik Gula Aren Masarang', *Jurnal EMBA*, 4(3), pp. 695–704.
- Putra, M.S.A., Alamsyah, M.N. and Kamindang, I. (2024) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA PALU', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(1), pp. 91–103.
- Ramdani, R.S., Nurhannis and Abdi, F.S. (2024) 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN DI PASAR MASOMBA KOTA PALU', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 1–14.
- RATNA, I.D. (2025) *EFEKTIVITAS PERENCANAAN RENCANA INDUK KELITBANGAN (Studi Kasus Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Selvia, S.I. and Danasari, I.F. (2024) 'STRATEGI PENGEMBANGAN HULU HILIR PENGOLAHAN GULA AREN DI DESA AGROWISATA KEKAIT: -', *JURNAL AGRIBISNIS*, 13(1), pp. 19–27. Available at: <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v13i1.3097>.

- Terry, G.R. (1977) *Principles of Management*. 7th edn.
- Wahida, N., Hartawan and Mahfuzat (2025) 'PRAKTIK GOOD GOVERNANCE PEMERINTAHAN BAHORURU DALAM PENYALURAN BERAS MISKIN DI KABUPATEN MOROWALI', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(3), pp. 125–137.
- Wirawan, D.A., Pageno, I. and Alamsyah, M.N. (2024) 'SMART GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU', *JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan*, 1(2), pp. 136–151.